



## Efisiensi Biaya Peremajaan Kelapa Sawit Pola Swadaya di Desa Sei Putih

Daniel Noviard Sitorus<sup>1\*</sup>, Sakti Hutabarat<sup>2</sup>, Didi Muwardi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

### ARTIKEL INFO

Sejarah artikel  
Diterima 18/08/2022  
Diterima dalam bentuk revisi 10/11/2022  
Diterima dan disetujui 10/03/2023  
Tersedia online 16/06/2023

Kata kunci  
Efisiensi biaya  
Kelapa sawit  
Pekebun swadaya  
Peremajaan  
Standar biaya nasional

### ABSTRAK

Efisiensi biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengendalikan biaya agar pertindak efisien yaitu hasil akhir tidak jauh menyimpang dari standar yang telah ditentukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar sehingga dapat dicapai suatu efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan standar biaya peremajaan nasional dengan biaya peremajaan kelapa sawit swadaya dan mengetahui efisiensi biaya peremajaan pekebun swadaya. Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai bulan Mei 2022. Studi ini menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus, dimana semua pekebun yang tergabung dalam kelompok tani Rezeki Baru dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, untuk menjawab tujuan pertama, sedangkan untuk tujuan kedua menggunakan analisis efisiensi biaya peremajaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan standar biaya nasional peremajaan kelapa sawit di daerah Riau pada tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp 62.762.000,-/ha, sedangkan biaya rata-rata yang dikeluarkan pekebun pada peremajaan kelapa sawit sebesar Rp 52.045.898,-/ha. Selisih biaya rata-rata peremajaan yang dikeluarkan pekebun dengan biaya yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 17,07%. Rasio efisiensi biaya menunjukkan nilai 82,93%, yang artinya peremajaan yang dilakukan pekebun kelompok tani Rezeki Baru tidak baik. Biaya peremajaan yang kurang efisien ini dikarenakan adanya kegiatan peremajaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak dilakukan oleh pekebun sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh pekebun.

© 2023 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

\*Email Penulis Korespondensi : [danielsitorus202@gmail.com](mailto:danielsitorus202@gmail.com)  
[danielsitorus202@gmail.com](mailto:danielsitorus202@gmail.com)<sup>1</sup>, [sakti.hutabarat@lecturer.unri.ac.id](mailto:sakti.hutabarat@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [didimuwardi@gmail.com](mailto:didimuwardi@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

The cost efficiency referred to in this study is to control costs so that the action is efficient, namely the final result does not deviate much from the predetermined standard by comparing the actual cost with the standard cost so that an efficiency can be achieved. The objective of this study were to analyze the difference between the national cost and the cost of oil palm replanting and to determine the cost efficiency of replanting of independent smallholders in Sei Putih Village, Tapung District, Kampar Regency. This research was conducted in Sei Putih Village, Tapung District, Kampar Regency, Riau Province. Research activities are carried out from November 2020 to May 2022. The sampling method used in this research is census, where all the planters who are members of the Rezeki Baru Farmers Group are sampled. Data were analysed using descriptive analysis for the first research questions, meanwhile, the third research

question uses replanting cost efficiency analysis. The result of this study shows that the national cost standard for oil palm replanting in the Riau area in 2015 and 2016 was IDR 62,762,000/ha in one hectare. The average cost of replanting by independent smallholders was IDR 52,045,898/ha, while the cost from the government is IDR 62,762,000. The difference between the average replanting costs incurred by the farmers and the costs set by the government was 17,07%. The cost efficiency ratio shows a value of 82.93%, which means that the rejuvenation carried out by the Rezeki Baru Farmers Group planters is not good. This inefficient replanting cost is due to the fact that the rejuvenation activities that have been determined by the government are not carried out by the planters properly, resulting in differences in the costs incurred by the planters.

### PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang berpotensi sebagai penghasil produk unggul untuk ekspor, sumber pendapatan dan devisa negara. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis jacq*) masih menjadi andalan Indonesia sebagai komoditas ekspor serta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang dari tahun ke tahun semakin meningkat (Siswandi, 2016). Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau menunjukkan trend yang semakin meningkat, dapat dilihat dari semakin luasnya lahan dan meningkatnya produksi rata-rata per tahun. Direktorat Jendral Perkebunan (2022) mencatat luas areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2021 yaitu 2.900.000 ha dengan jumlah produksi sebesar 10.270.149 ton.

Desa Sei Putih merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Tanaman kelapa sawit di Desa Sei Putih sudah memasuki usia tidak produktif karena berumur 32 tahun (Permentan, 2016).

Kondisi tanaman yang sudah tua dan tidak produktif akan dapat menyebabkan produktivitas menjadi rendah, dan untuk meningkatkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, maka para pekebun yang melakukan usaha tani kelapa sawit juga harus memperhatikan umur ekonomis kelapa sawit. Umur ekonomis tanaman kelapa sawit adalah sekitar 25 tahun, dimana tanaman kelapa sawit yang melewati umur ekonomis harus segera diremajakan untuk memperbaiki produktivitas yang menurun tajam. Standar produktivitas yang dapat dijadikan patokan masa peremajaan adalah sekitar 10 ton TBS/ha/tahun (Permentan, 2016).

Peremajaan adalah pembukaan areal dari bekas perkebunan kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif lagi (Fauzi *et al.*, 2012). Pemilihan teknik peremajaan yang tepat tidak ditinjau dari aspek teknis agronomis, melainkan juga melihat aspek sosial ekonomi serta penggunaan benih/bibit (Minsyah, 2020). Berbagai alternatif model *replanting* tersedia

untuk digunakan oleh pekebun diantaranya tanaman ulang total, tanam ulang *underplanting*, dan tanaman ulang *intercropping* (Manurunget *et al.*, 2015).

Pekebun diharuskan segera melaksanakan kegiatan peremajaan, jika tidak maka ke depannya untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit swadaya sebagai pemasok TBS dan sumber devisa stabilitasnya akan terganggu (Jelsma *et al.*, 2017). Persepsi pekebun terhadap kegiatan peremajaan sangat baik, hal ini berimplikasi pada tingginya tingkat kesiapan pekebun untuk melakukan peremajaan kelapa sawit pada saat umur tanaman kelapa sawit sudah tidak produktif lagi (Hutasoitet *et al.*, 2015). Pesan utama untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah adalah pentingnya membentuk kelompok tani dan koperasi tani kelapa sawit rakyat untuk menyiapkan semua persyaratan dan tahapan kegiatan peremajaan kelapa sawit (Noer *et al.*, 2019).

Pemerintah menyediakan bantuan dana untuk pengembangan kebun kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS merupakan badan pengelola dana perkebunan yang didirikan untuk melakukan penghimpunan dana dalam mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit. Salah satu penggunaan dari dana yang dihimpun tersebut adalah Program bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat (Kusumawati *et al.*, 2019).

Kelompok tani Rezeki Baru merupakan kelompok tani swadaya di Desa Sei Putih yang

memulai kegiatan peremajaan kelapa sawit pada tahun 2019 dengan luas lahan 74 ha, dimana saat ini rata-rata umur tanaman kelapa sawit sudah berumur 3 tahun dan belum ada melakukan kegiatan pemanenan. Sebelum peremajaan kelapa sawit dilaksanakan rata-rata pekebun menjual hasil kebunnya secara masing-masing, hal ini disebabkan karena KUD yang sudah tidak ada. Kelompok tani menjadi salah satu syarat bagi pekebun untuk bisa mendapatkan dana dari pemerintah melalui BPDPKS. Kelompok tani merupakan syarat mutlak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui BPDPKS untuk membantu permodalan para pekebun dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit (Nurfathiyah & Rendra, 2019).

Pekebun yang tergabung ke dalam kelompok tani Rezeki Baru juga harus memenuhi persyaratan yang lain, yaitu seperti adanya mitra dengan tujuan untuk membantu kelompok tani dalam bentuk modal biaya perawatan kelapa sawit. Mitra yang tergabung dalam kelompok tani Rezeki Baru yaitu Bank Riau dan PT.WKP (Wira Karya Pramitra), adapun alasan kelompok tani memilih Bank Riau karena bunganya rendah dan pekebun diberi waktu untuk membayar angsuran selama 5 tahun setelah tanaman kelapa sawit sudah produksi.

Permasalahan yang dihadapi oleh pekebun swadaya pada kegiatan peremajaan kelapa sawit saat ini adalah pekebun belum memanfaatkan dengan baik dalam penggunaan dana BPDPKS yang diberikan oleh pemerintah. Inovasi peremajaan kelapa sawit dinilai cukup menguntungkan dan cukup mudah dalam

penerapannya, namun cukup rumit untuk diterapkan sesuai dengan anjuran pemerintah (Anggreany *et al.*, 2016). Aspek yang menjadi persoalan dalam penggunaan dana BPDPKS yang diberikan oleh pemerintah yaitu ada aspek administrasi dan aspek pembiayaan (Siahaan *et al.*, 2020). Aspek administrasi, adanya yang beralamat di luar daerah sehingga menjadi kendala bagi pekebun untuk memperoleh dana bantuan dari BPDPKS. Aspek pembiayaan pada peremajaan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh pekebun tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Persoalan yang perlu diketahui dalam pelaksanaan PSR ialah bagaimana ketentuan melakukan peremajaan kelapa sawit yang ditinjau dari aspek pembiayaan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan dan apakah biaya yang dikeluarkan pekebun sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada dana peremajaan sawit rakyat khususnya di Desa Sei Putih serta melihat perbandingan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh pekebun dengan standar biaya pemerintah selama proses peremajaan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan standar biaya nasional dengan biaya peremajaan kelapa sawit dan mengetahui efisiensi biaya peremajaan pekebun swadaya di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan

bahwa Desa Sei Putih Kecamatan Tapung merupakan salah satu daerah perkebunan kelapa sawit yang telah melakukan peremajaan. Di daerah ini sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa sawit. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Maret 2022, dengan tahapan mulai dari penyusunan proposal dan kuesioner, survei lapangan, pengumpulan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan yaitu profil pekebun, keragaan kebun, profil kelompok tani dan data biaya-biaya peremajaan yang dikeluarkan oleh pekebun yang bersumber dari pekebun. Data sekunder yang digunakan yaitu data luas lahan dan produksi perkebunan kelapa sawit Kabupaten Kampar yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, standar biaya peremajaan kelapa sawit yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan, gambaran umum wilayah penelitian yang bersumber dari kantor desa.

Metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *sensus*. Teknik *sensus* adalah teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2016). Teknik ini dilakukan kepada pekebun kelompok tani Rezeki Baru yang sudah melakukan peremajaan dengan anggota sebanyak 37 pekebun. Teknik ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil, dengan demikian pada metode ini semua anggota populasi dijadikan sampel.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial untuk menjawab tujuan pertama dengan membandingkan biaya peremajaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan (DIRJENBUN) dengan biaya yang dikeluarkan oleh pekebun. Analisis deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian melalui data atau sampel yang terkumpul (Sugiyono, 2016). Tujuan kedua menggunakan analisis efisiensi biaya

peremajaan untuk mengetahui dan mengukur tingkat efisiensi dengan memperhatikan beberapa aspek pembiayaan yang dikeluarkan oleh pekebun untuk mendukung peremajaan kelapa sawit di lapangan yaitu mulai dari biaya kegiatan proses penanaman awal (P<sub>0</sub>) sampai dengan pemeliharaan tahun ketiga (P<sub>3</sub>). Aspek pembiayaan tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Keterangan biaya peremajaan kelapa sawit rakyat per hektar

No	Kegiatan	Uraian
1	Penanaman Awal (P0)	Tenaga kerja Infrastruktur Bahan dan Alat Biaya Pengelolaan 5% Sertifikat Lahan
2	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	Tenaga kerja Bahan dan Alat Biaya Pengelolaan 5%
3	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	Tenaga kerja Bahan dan Alat Biaya Pengelolaan 5%
4	Pemeliharaan Tahun Ketiga (P3)	Tenaga kerja Bahan dan Alat Biaya Pengelolaan 5%

Sumber: SK Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015

Perbandingan selisih persentase biaya peremajaan kelapa sawit antara pekebun dengan standar biaya pemerintah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Selisih} = \frac{B \text{ Pemerintah} - B \text{ rata-rata pekebun}}{B \text{ pemerintah}} \times 100\%$$

Aspek pembiayaan pada peremajaan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun dapat dianalisis menggunakan Microsoft Office Excel dan setelah didapatkan hasil biaya peremajaan kelapa sawit oleh pekebun,

kemudian dibandingkan dengan standar biaya nasional peremajaan kelapa sawit dari pemerintah. Selanjutnya, dilihat dan dianalisis efisiensi biaya peremajaan kelapa sawit dari pekebun di kelompok tani Rezeki Baru.

Tujuan kedua penelitian ini menggunakan analisis efisiensi biaya peremajaan kelapa sawit, yang dapat diukur menggunakan rumus rasio efisiensi dari Mahmudi (2010).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya rata-rata pekebun}}{\text{Biaya pemerintah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi efisiensi biaya peremajaan

Kriteria	Kategori
>100	Sangat Efisien
=100	Efisien
90% - 99%	Cukup Efisien
75% - 89%	Kurang Efisien
<75%	Tidak Efisien

Sumber: Sunandar (2012)

### HASIL

Tanaman kelapa sawit di Desa Sei Putih telah memasuki masa peremajaan, dimana umur tanaman kelapa sawit sudah lebih dari 25 tahun dan telah melewati umur ekonomisnya. kelompok tani Rezeki Baru merupakan salah satu kelompok tani di Desa Sei Putih yang mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS merupakan badan pengelola dana perkebunan yang didirikan untuk melakukan penghimpunan dana dalam mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit. Salah satu penggunaan dari dana yang

dihimpun tersebut adalah program bantuan dana peremajaan sawit rakyat (PSR). BPDPKS memberikan bantuan dana kepada pekebun sebesar Rp. 25.000.000/ha dengan luasan maksimal kebun yang dibiayai adalah 4 ha per pekebun, dimana total biaya peremajaan yang sesuai standar pemerintah sebesar Rp. 62.762.000/ha. Dana yang diberikan BPDPKS 25 juta/ha digunakan pada kegiatan penumbangan, *chipping*, membeli bibit, membuat lubang tanam dan menanam bibit. Kekurangan dari biaya peremajaan yang diberikan oleh BPDPKS harus disiapkan pekebun, supaya sesuai dengan standar biaya pemerintah. Pekebun memperoleh tambahan dana dengan cara meminjam ke Bank Riau untuk modal perawatan tahun pertama (P1) sampai perawatan tahun ke lima (P5).

Tabel 3. Satuan biaya maksimum per hektar peremajaan kelapa sawit di lahan kering tahun 2015 dan 2016

No	Kegiatan	Biaya Peremajaan (Rp)
1	<b>PO Pembukaan lahan dan penanaman</b>	25.640.000
	- Tenaga Kerja	
	- Infrastruktur	
	- Bahan dan alat	
	- Biaya Pengelolaan 5%	
	- Sertifikasi Lahan	
2	<b>P1 Pemeliharaan Tahun Pertama</b>	10.895.000
	- Tenaga Kerja	
	- Bahan dan Alat	
	- Biaya Pengelolaan 5%	
3	<b>P2 Pemeliharaan Tahun Kedua</b>	12.414.000
	- Tenaga Kerja	
	- Bahan dan Alat	
	- Biaya Pengelolaan 5%	
4	<b>P3 Pemeliharaan Tahun ketiga</b>	13.813.000
	- Tenaga Kerja	
	- Bahan dan Alat	
	- Biaya Pengelolaan 5%	
	<b>Jumlah</b>	<b>62.762.000</b>

Sumber: SK Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015

Penanaman sawit sudah mulai dilakukan pada tahun 2019 menggunakan jenis bibit

marihat yang diperoleh dari mitra PT. Hijau. Pola tanam yang digunakan dalam peremajaan



ini yaitu pola tanam mata lima dengan jumlah populasi 132 pokok/ha. Pekebun kelompok tani Rezeki Baru yang melakukan peremajaan kelapa sawit berjumlah 37 pekebun dengan luas lahan untuk masing-masing pekebun yaitu 2 ha. Model alternatif peremajaan kelapa sawit di kelompok tani Rezeki Baru adalah model peremajaan tanam ulang total (TUT), dimana model ini sudah menjadi ketentuan pemerintah yang diwajibkan kepada pekebun jika ingin mendapatkan bantuan dana dari BPDPKS. Peremajaan tanam ulang total adalah peremajaan kelapa sawit dengan cara menebang tanaman tua secara keseluruhan dan menanam kembali tanaman baru secara serentak (Susanti *et al.*, 2014).

Secara umum, tahapan peremajaan tanaman kelapa sawit sesuai dengan standar nasional yang disusun mengacu pada sistem penumbangan serempak dengan pertimbangan bahwa sistem ini memiliki keunggulan, yaitu adanya pengolahan tanah yang lebih intensif sehingga persiapan lahan menjadi lebih baik dan dapat menyediakan media tanam yang lebih ideal bagi tanaman, selain itu adanya pencacahan batang dan penanaman kacang pada sistem ini dapat bermanfaat untuk mempercepat laju pelapukan, menjaga kelembaban tanah, menekan resiko serangan hama dan mengurangi penyebaran penyakit. Sistem penumbangan dilakukan dengan cara mengolah tanah diikuti dengan penumbangan dan pencacahan batang, persiapan penanaman dan proses penanaman, serta pemeliharaan TBM.

Pemeliharaan selama masa tanaman belum menghasilkan perlu dilakukan sesuai

standar kultur teknis TBM yang meliputi konsolidasi dan penyisipan tanaman, pembersihan piringan pohon, pemeliharaan kacang penutup tanah, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan, kastrasi, tunas pasir, persiapan sarana panen, dan pemeliharaan jalan serta parit drainase.

Pemupukan merupakan suatu kegiatan dalam menyediakan unsur hara yang cukup dan berimbang yang sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga tanaman akan dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Curah hujan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam pemupukan, dimana curah hujan yang kurang dapat menurunkan efektifitas pupuk yang diberikan ke tanaman sedangkan curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan mudahnya kehilangan hara karena tercuci. Standar nasional dosis pupuk yang digunakan yaitu untuk pupuk urea sebanyak 250 gram/pokok, pupuk RP 250 gram/pokok, pupuk MOP 500 gram/pokok, pupuk dolomit 500 gram/pokok dan pupuk borax 50 gram/pokok (Permentan, 2016).

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan berdasarkan hasil pengamatan. Jenis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang umum menyerang tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan adalah kumbang tanduk, ulat api, belalang, tikus dan lain-lain. Cara yang digunakan untuk pengendalian OPT tersebut adalah menggunakan pestisida yang harus terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.

Kegiatan kastrasi dilakukan pada tanaman berumur 18 sampai 24 bulan dengan rotasi 1 kali sebulan. Kegiatan ini dilakukan

dengan cara membuang semua bunga jantan dan betina. Adapun manfaat dari kastrasi adalah untuk merangsang dan mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif, mendapatkan buah dengan berat yang seragam dan mendapatkan kondisi tanaman yang bersih.

Biaya peremajaan yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk ke dalam wilayah 3 untuk Provinsi Riau adalah sebesar Rp 62.762.000,-/ha (Direktorat Jendral Perkebunan, 2015). Pengalokasian biaya peremajaan kelapa sawit oleh pemerintah terdiri dari biaya penanaman awal (P<sub>0</sub>), biaya pemeliharaan tahun pertama (P<sub>1</sub>), biaya pemeliharaan tahun kedua (P<sub>2</sub>) dan pemeliharaan tahun ketiga (P<sub>3</sub>). Pengalokasian biaya terbesar berada pada kegiatan penanaman

awal (P<sub>0</sub>) dan yang terendah berada pada kegiatan pemeliharaan tanaman tahun pertama (P<sub>1</sub>).

Peremajaan kelapa sawit membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga membuat pekebun kesulitan dalam mencari dana untuk pembiayaan peremajaan kelapa sawit tersebut. Pemerintah membantu pekebun dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp 25.000.000/ha melalui BPDPKS. Dana ini membantu meringankan beban pekebun terkait permasalahan biaya peremajaan kelapa sawit (rincian biaya bahan dan alat pada peremajaan kelapa sawit dari P<sub>0</sub> sampai P<sub>3</sub> di kelompok tani Rezeki Baru disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian biaya bahan dan alat pada peremajaan kelapa sawit dari P<sub>0</sub> sampai P<sub>3</sub> di Kelompok tani Rezeki Baru

No	Bahan dan Alat	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Penanaman Awal (P <sub>0</sub> )		
	Pembelian Bibit Sawit	5.676.000	89,60
	Patok Batas	280.000	4,42
	Pupuk RP Untuk Sawit	138.600	2,19
	Tiang Pancang Tanam	132.000	2,08
	Tiang Pancang Rumpun	18.000	0,29
	Herbisida	90.000	1,42
	<b>Jumlah</b>	<b>6.334.600</b>	
B	Pemeliharaan tanaman 1 tahun (P <sub>1</sub> )		
1	Herbisida 2 Ltr/Ha x 2 Rotasi	360.000	8,22
2	Pupuk MOP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok)	1.874.400	42,83
3	Pupuk Dolomite 1,5 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok)	264.000	6,03
4	Pupuk RP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok)	554.400	12,66
5	Pupuk Urea 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok)	1.683.000	38,46
	<b>Jumlah</b>	<b>4.375.800</b>	
C	Pemeliharaan tanaman 2 Tahun (P <sub>2</sub> )		
1	Herbisida 2 Ltr/Ha x 2 Rotasi	360.000	6,49
2	Pupuk MOP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok)	1.874.400	33,82
3	Pupuk Dolomite 1,5 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok)	198.000	3,58
4	Pupuk TSP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok)	1.848.000	33,34
5	Pupuk Urea 1,5 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok)	1.262.250	22,77
6	Pupuk Borax 0,05 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok)	72.600	1,30
	<b>Jumlah</b>	<b>5.542.650</b>	
D	Pemeliharaan tanaman 3 tahun (P <sub>3</sub> )		
1	Herbisida 1,5 Ltr/Ha x 2 Rotasi	270.000	4,54
2	Pupuk MOP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok)	1.874.400	31,52



3	Pupuk Dolomite 1,5 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok)	198.000	3,57
4	Pupuk TSP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok)	1.848.000	33,34
5	Pupuk Urea 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok)	1.683.000	22,77
6	Pupuk Borax 0,05 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok)	72.600	1,30
Jumlah		5.946.000	
Total		22.199.050	

Sumber: Data olahan, 2022.

Pengalokasian biaya peremajaan kelapa sawit untuk bahan dan alat dari P0 sampai P3 di kelompok tani Rezeki Baru adalah sebesar Rp 22.199.050,-. Biaya tertinggi yang dikeluarkan untuk peremajaan kelapa sawit pada bahan dan alat yaitu berada pada penanaman awal (P<sub>0</sub>) sebesar Rp 6.334.600,- hal ini dikarenakan

besarnya biaya kegiatan pada investasi awal peremajaan kelapa sawit dan yang terendah yaitu pada pemeliharaan tanaman tahun pertama (P<sub>1</sub>) sebesar Rp 4.375.800,-. Biaya upah tenaga kerja untuk peremajaan kelapa sawit di kelompok tani Rezeki Baru seperti yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah tenaga kerja pada peremajaan kelapa sawit dari P0 sampai P3 di kelompok tani Rezeki Baru

No	Upah Tenaga Kerja	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Penanaman Awal (P0)	16.770.800	62,03
2	Pemeliharaan Tahun 1 (P1)	3.434.050	12,70
3	Pemeliharaan Tahun 2 (P2)	3.333.346	12,33
4	Pemeliharaan Tahun 3 (P2)	3.499.200	12,94
Jumlah		27.037.396	100,00

Sumber: Data olahan, 2022.

Tabel 6. Biaya operasional peremajaan kelapa sawit di kelompok tani Rezeki Baru

No	Biaya Operasional	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Penanaman Awal (P0)	1.167.770	41,57
2	Pemeliharaan Tahun 1 (P1)	473.695	16,86
3	Pemeliharaan Tahun 2 (P2)	572.037	20,36
4	Pemeliharaan Tahun 3 (P2)	595.950	21,21
Jumlah		2.809.452	100,00

Sumber: Data olahan, 2022.

Pengalokasian biaya peremajaan kelapa sawit untuk upah tenaga kerja dari P0 sampai P3 di kelompok tani Rezeki Baru adalah rata-rata sebesar Rp 27.037.396,-. Biaya tertinggi yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja yaitu berada pada penanaman awal (P<sub>0</sub>) dan yang terendah berada pada pemeliharaan tahun kedua (P<sub>2</sub>). Besarnya biaya yang dikeluarkan pada penanaman awal dikarenakan

kebutuhan tenaga kerja yang juga besar mulai dari pembersihan lahan, pemancangan, pembibitan, penanaman, pemupukan, dan lain sebagainya. Upah tenaga kerja untuk pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pengaplikasian herbisida yaitu sama dari P<sub>1</sub> sampai P<sub>3</sub>. Biaya operasional yang juga dikeluarkan oleh pekebun untuk peremajaan

kelapa sawit seperti yang disajikan pada Tabel 6.

Biaya operasional yang dikeluarkan oleh pekebun adalah sebesar Rp 2.809.452,-. Biaya operasional tertinggi yang dikeluarkan pekebun yaitu pada penanaman awal (P<sub>0</sub>) sebesar

41,57%, sementara itu pada pemeliharaan tahun pertama sampai tahun ketiga tidak berbeda jauh. Besarnya biaya operasional pada penanaman awal dikarenakan kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan pemeliharaan tahun pertama sampai tahun ketiga.

Tabel 7. Biaya rata-rata yang dikeluarkan pada peremajaan kelapa sawit milik pekebun

No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Penanaman awal (P <sub>0</sub> )	24.273.170	46,64
2	Pemeliharaan tahun pertama (P <sub>1</sub> )	8.283.545	15,92
3	Pemeliharaan tahun kedua (P <sub>2</sub> )	9.448.033	18,15
4	Pemeliharaan tahun ketiga (P <sub>3</sub> )	10.041.150	19,29
Jumlah		52.045.898	100,00

Sumber: Data olahan, 2022.

Biaya rata-rata yang dikeluarkan pekebun pada peremajaan kelapa sawit yaitu sebesar Rp 52.045.898,-. Biaya peremajaan kelapa sawit yang dikeluarkan pekebun terbesar berada pada penanaman awal (P<sub>0</sub>) yaitu sebesar 46,64% dan yang terendah berada pada pemeliharaan

tanaman tahun pertama (P<sub>1</sub>) yaitu sebesar 15,92%. Biaya rata-rata yang dikeluarkan pekebun berbeda dari biaya yang ditetapkan oleh pemerintah seperti yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan biaya peremajaan kelapa sawit di kelompok tani Rezeki Baru dengan biaya pemerintah

No	Jenis Kegiatan	Biaya Pemerintah(Rp)	Biaya Rata-Rata Pekebun (Rp)	Selisih (%)
1	Penanaman awal (P <sub>0</sub> )	25.640.000	24.273.170	5,33
2	Pemeliharaan tahun 1 (P <sub>1</sub> )	10.895.000	8.283.545	23,97
3	Pemeliharaan tahun 2 (P <sub>2</sub> )	12.414.000	9.448.033	23,89
4	Pemeliharaan tahun 3 (P <sub>3</sub> )	13.813.000	10.041.150	27,30
Jumlah		62.762.000	52.045.898	17,07

Sumber: Data Olahan, 2022.

Biaya peremajaan kelapa sawit di kelompok tani Rezeki Baru lebih rendah dibandingkan dari biaya yang ditetapkan pemerintah. Selisih biaya peremajaan rata-rata yang dikeluarkan pekebun dengan biaya yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 17,07 %. Selisih pengalokasian biaya peremajaan yang lebih besar yaitu pada kegiatan pemeliharaan tanaman tahun ketiga (P<sub>3</sub>) sebesar 27,30% dan

yang terendah pada penanaman awal sebesar 5,33%.

Perbedaan biaya peremajaan pada kegiatan P<sub>0</sub> sampai P<sub>3</sub> dikarenakan kegiatan yang direkomendasikan pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik oleh pekebun. Penerapan peremajaan yang tidak sesuai standar pemerintah bisa berdampak buruk terhadap keberlanjutan produktivitas tanaman

kelapa sawit. Perbedaan tersebut terjadi karena pekebun tidak menanam kacang penutup tanah pada penanaman awal, penggunaan dosis pupuk yang berbeda, seperti pupuk urea yang digunakan pekebun yaitu sebanyak 2 kg/pokok sementara standar pemerintah sebanyak 3,25kg/pokok, begitupula dengan pupuk dolomit, MOP, RP dan borax. Kegiatan kastrasi juga terdapat perbedaan pada pekebun, dimana dilakukan 6 kali dalam setahun sedangkan standar dari pemerintah dilakukan 1 kali sebulan, serta pemeliharaan jalan, parit drainase dan pasar pikul.

Efisiensi biaya merupakan bagaimana seseorang melakukan kegiatan usaha pertanian dengan mengalokasikan biaya yang ada dan digunakan secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut [Julita \(2015\)](#), efisiensi merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi biaya tersebut diketahui dari perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan selama kegiatan peremajaan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun kelompok tani Rezeki Baru kemudian dibandingkan dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah/DITJENBUN.

Tabel 9. Efisiensi biaya peremajaan kelapa sawit

No	Jenis Kegiatan	Biaya Pemerintah (Rp)	Biaya Rata-Rata Pekebun (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
1	Penanaman awal (P <sub>0</sub> )	25.640.000	24.273.170	94,67
2	Pemeliharaan tahun 1 (P <sub>1</sub> )	10.895.000	8.283.545	76,03
3	Pemeliharaan tahun 2 (P <sub>2</sub> )	12.414.000	9.448.033	76,10
4	Pemeliharaan tahun 3 (P <sub>3</sub> )	13.813.000	10.041.150	72,69
	Rata-rata	62.762.000	52.045.898	82,93

Sumber: Data olahan, 2022.

Rasio efisiensi biaya peremajaan menunjukkan nilai 82,93%, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya peremajaan berada pada kategori kurang efisien. Angka ini menunjukkan ketidakpatuhan pekebun terhadap rekomendasi pemerintah untuk budidaya kelapa sawit di wilayah setempat. Biaya-biaya yang dikeluarkan pekebun tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah mulai dari penggunaan pupuk yang tidak tepat dosis, kurangnya kegiatan kastrasi yang dilakukan hanya 6 kali dalam setahun berdampak pada pertumbuhan vegetatif tanaman menjadi tidak optimal, dan kurangnya

kegiatan perawatan seperti pemeliharaan jalan, parit drainase, dan perawatan pasar pikul.

Perbedaan kegiatan peremajaan ini dikarenakan biaya peremajaan yang begitu mahal, sehingga membuat pekebun kesulitan mencari tambahan dana untuk biaya peremajaan tersebut. Dana bantuan yang diberikan Pemerintah Rp 25.000.000/ha tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya peremajaan sawit sampai pemeliharaan tanaman tahun ke-3, dimana pekebun yang tergabung pada kelompok tani Rezeki Baru harus menyiapkan lagi rata-rata tambahan dana senilai Rp 37.762.000 dari total biaya yang dibutuhkan. Kekurangan dari dana tersebut disiapkan

pekebun dengan cara meminjam uang ke bank dalam bentuk modal biaya perawatan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Standar biaya nasional peremajaan kelapa sawit di daerah Riau pada tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp 62.762.000 dalam satu hektar. Pengalokasian biaya peremajaan kelapa sawit oleh pemerintah terdiri dari biaya penanaman awal ( $P_0$ ), biaya pemeliharaan tahun pertama ( $P_1$ ), biaya pemeliharaan tahun kedua ( $P_2$ ) dan pemeliharaan tahun ketiga ( $P_3$ ). Biaya rata-rata yang dikeluarkan pekebun pada peremajaan kelapa sawit yaitu sebesar Rp 52.045.898. Selisih biaya peremajaan rata-rata yang dikeluarkan pekebun dengan biaya yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 17,07 %. Perbedaan biaya peremajaan kelapa sawit ini dikarenakan adanya perbedaan kegiatan pada penanaman awal, perbedaan dosis pupuk yang digunakan, pemeliharaan jalan, dan pasar pikul. Rasio efisiensi biaya menunjukkan nilai 82,93%, yang artinya peremajaan yang dilakukan pekebun kelompok tani Rezeki Baru tidak baik. Biaya peremajaan kelapa sawit yang dikeluarkan pekebun tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana biaya yang dikeluarkan pekebun lebih sedikit. Biaya peremajaan yang kurang efisien ini dikarenakan adanya kegiatan peremajaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak dilakukan oleh pekebun sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh pekebun.

Saran penelitian ini adalah pengurus kelompok tani sebaiknya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap biaya peremajaan

kelapa sawit yang dikeluarkan oleh pekebun agar sesuai dengan acuan pemerintah, sebab apabila kegiatan perawatan yang dikurangi-kurangi atau tidak dilakukan akan berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit kedepannya.

### PERNYATAAN KONTRIBUSI

Dalam artikel ini, Daniel Noviardi Sitorus sebagai kontributor utama dan kontributor korespondensi, sementara Sakti Hutabarat dan Didi Muwardi sebagai kontributor anggota.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggreany, S., Muljono, P., & Sadono, D. (2016). Partisipasi petani dalam replanting kelapa sawit di Provinsi Jambi. *Jurnal Penyuluhan*, 12(1).
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2015). Satuan Biaya Maksimum Per Hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015 dan 2016. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2022). Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2021. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Fauzi, Y., Widyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., & Paeru, R. H. (2012). *Kelapa sawit*. Penebar Swadaya Grup.
- Hutasoit, F. R., Hutabarat, S., & Muwardi, D. (2015). Analisis persepsi petani kelapa sawit swadaya bersertifikasi rspo dalam menghadapi kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian*, 2(1), 1-13.
- Jelsma, I., Slingerland, M., Giller, K. E., & Bijman, J. (2017). Collective action in a smallholder oil palm production system in Indonesia: The key to sustainable and inclusive smallholder palm oil?. *Journal of rural studies*, 54, 198-210.
- Julita. (2015). Analisis anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian biaya produksi

- pada PT. Perkebunan Nusantara IV (PERSERO) Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 18-27.
- Kusumawati, S. A., Yahya, S., Hariyadi, H., Multasih, S., & Istina, I. N. (2019). Analisis pendapatan usahatani tumpangsari pada peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. *Buletin Palma*, 20(1), 45-56.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN.
- Manurung, L. P., Hutabarat, S., & Kaswarina, S. (2015). Analisis model peremajaan perkebunan kelapa sawit pola plasma di desa meranti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Sorot*, 10(1), 99-113.
- Minsyah, N. I. (2020). Kaitan biaya dan teknik peremajaan kelapa sawit rakyat. *JALOW*, 3(1).
- Noer, M., Syarfi, I. W., & Azhari, R. (2019). Persiapan peremajaan kebun kelapa sawit oleh KUD Suka Maju dan KUD Bukit Jaya Di Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat. *Buletin Ilmiah Negari Membangun*, 2(3), 134-144.
- Nurfathiyah, P., & Rendra, R. (2019). Penyuluhan Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Dan Kelembagaan Petani Di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(1), 86-94.
- Permentan. (2016). Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Siahaan, J. M., Siregar, T. H., & Siahaan, E. (2020). Analisis Kebijakan Program Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *AGRISAINS: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 2(2), 139-147.
- Siswandi. (2016). *Panduan Praktis Agribisnis Kelapa Sawit Rakyat Berwawasan Lingkungan (dengan Potensi Produksi 42 Ton/Ha/Tahun)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunandar. (2012). Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPKBKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Tegal. *Journal of Accounting Research*, 1(1).
- Susanti, E., Hutabarat, S., & Muwardi, D. (2014). Analisis perbandingan alternatif model peremajaan kelapa sawit konvensional dengan underplanting pola perkebunan inti rakyat (pir) di Desa Sei Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian*, 1(2), 1-9.